



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

*Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Kelurahan Pasan-Wawali, Kec. Ratahan, Telp/fax.(0431)3174679
website: www.mitrakab.go.id. email : dprkpmitra@gmail.com*

**KODE POS. 95695
RATAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-NYA sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diselesaikan. Dokumen RKPD ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam siklus perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS 2017.

Renja Kerja (RENJA) Tahun 2017 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.

Akhirnya melalui Rencana Kerja dapat memberikan manfaat dengan menyadari sepenuhnya bahwa dokumen RKPD Tahun 2017 belumlah sempurna, karena itu semua saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaannya akan menjadi perhatian kami.

Ratahan, Februari 2017

**KEPALA DINAS
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman**

**Ir. DENNIJ S. R. PORAJOW, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601204 198903 1 009**

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan
- D. Sistematika Penulisan
- E. Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM

- A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini
- B. Kondisi Yang Diinginka dan Proyeksikan Kedepan
- C. Tugas dan Fungsi

BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- B. Strategi dan Kebijakan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daerah adalah merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dan dasar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun. Selain itu Pemerintah Daerah memiliki Dokumen Rencana Kerja yang berdasar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi dokumen Pemerintah sebagai dasar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan disegala bidang baik pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk pihak dari Swasta, Organisasi dan lembaga-lembaga social maupun politik. Untuk itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja (RENJA), Tugas Pokok Dan Fungsi yang selanjutnya untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD)

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor * Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
9. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara

C. HUBUNGAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang disusun dalam rangka penyusunan strategi untuk kegiatan dan program kedepan. Pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dijadikan sebagai dokumen Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar serta acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, yang kemudian penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Selanjutnya dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inilah akan disusun (RAP).

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Minahasa Tenggara disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum

Bab ini menjelaskan Kondisi Daerah masa kini, Kondisi yang di inginkan dan proyeksi kedepan, Tugas dan Fungsi Dinas.

Bab III : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab IV : Program dan Kegiatan

Bab V : Penutup

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksud untuk dijadikan suatu dokumen Perencanaan Tahunan dimana sebagai jabaran Visi dan Misi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun melalui APBN.
2. Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tugas.
3. Sebagai wacana dalam menunjang program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tepat guna.
4. Memperkuat koordinasi dan menjamin terciptanya suatu kinerja yang mantap, berdayaguna dan berhasil guna sesuai maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tugas Pokok yaitu : Melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Perumahan dan Permukiman, serta perumusan kebijakan teknis pemberian perizinan, dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan unit pelaksana Dinas, pengelolaan urusan ketatalaksanaan, pembinaan teknis operasional.

Dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Tugas maka telah disusun rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tentang uraian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun 2013 – 2018 serta Rencana Kerja tahun 2017 dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA – SKPD) tahun 2018. Disamping menunggu Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang akan dijadikan dasar maupun acuan dan Pedoman operasional maka telah diupayakan Sarana dan Prasarana kantor sebagai pusat kegiatan administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sarana penunjang lainnya dengan kapasitas yang masih sangat terbatas dan kurang, namun semangat serta tekad dalam menunjang pembangunan daerah yang baru yakni Kabupaten Minahasa Tenggara di Bidang Perumahan dan Permukiman, sudah berjalan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya langkah awal dengan mengadakan pendataan, pembinaan, serta pelaksanaan.

B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Minahasa Tenggara sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuannya maka harapan agar apa yang diinginkan

dan menjadi maksud dan tujuan dapat terwujud secara nyata agar kedepan Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan daerah yang baru dapat menyetarakan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang sudah lama yang sudah nampak pembangunannya serta juga untuk kedepan maksud dan tujuan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera serta tingkat perekonomiannya bisa mencapai taraf internasional.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara adalah membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Perumahan dan Permukiman yang meliputi urusan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan dan permukiman kabupaten Minahasa Tenggara.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman

Melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan, permukiman, pertamanan, penerangan jalan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

- Penyusunan program kerja di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan penerangan jalan umum.

- Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dinas.
- Pemberian rekomendasi perijinan bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No. 03e tahun 2011 tentang Pembentukan SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara, Dinas Pariwisata mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. KepalaDinas

b. Sekretaris :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perumahan :

- Seksi Pembiayaan Perumahan
- Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan
- Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan

d. Bidang Permukiman :

- Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. VISI DINAS PARIWISATA

Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah :

“ Tersedianya Infrastruktur perumahan dan permukiman yang andal sebagai pendukung perwujudan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai daerah yang berbasis pada pertanian.”

MISI

- Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya organisasi secara terukur, menyeluruh dan berkesinambungan ;
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi infrastruktur yang terpadu, andal dan berkelanjutan ;
- Melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Public melalui penataan dan pengembangan taman di kawasan perkotaan serta pengelolaan penerangan jalan umum ;

TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan :

1. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang berkompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima dengan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Meningkatkan hunian yang layak pada lingkungan permukiman yang berkualitas dan tertib administrasi pertanahan.
3. Membangun prasarana dan sarana utilitas demi memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kabupaten Minahasa Tenggara.

b. Sasaran :

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dapat dibandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang ditetapkan. Mengacu pada tujuan tersebut di atas maka sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas
3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dinas
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
5. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan dinas yang transparan
6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
7. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
8. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
9. Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan perumahan, Kawasan permukiman, dan Pertanahan.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Sesuai *Visi* dan *Misi* serta tujuannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai strategi agar dalam kegiatan maupun program-program yang telah dipaparkan akan tercapainya sasaran yang dimaksud sebagai berikut :

- Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang,

sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.

- Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan..
- Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah.
- Mengembangkan multi sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan
- Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan

b.Kebijakan

Untuk mencapai tujuan sesuai yang diinginkan maka kebijakan yang diambil yaitu : Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi – sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang meliputi : pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya dan fasilitasi perumahan khusus.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Daerah yang mapan infrastruktur baik di bidang Perumahan maupun di bidang Permukiman.
2. Terbangunnya Perumahan yang layak huni di kabupaten Minahasa Tenggara
3. Peningkatan prasarana dan sarana utilitas perumahan.
4. Meningkatkan pembangunan permukiman yang layak
5. Fokus Prioritas Pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017
6. Usulan program dan kegiatan dari masing-masing bidang.

Adapun Program dan Kegiatan Terdiri dari :

1. Program Pengembangan Perumahan :
 - Penataan Permukiman Kelurahan Wilayah I
 - Penataan Permukiman Kelurahan Wilayah II
 - Pengadaan Papan Nama Jalan
 - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - Pengadaan lahan pembangunan perumahan daerah pesisir
 - Sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya
 - Pembangunan perumahan PNS
 - Peningkatan kualitas rumah swadaya
 - Pembangunan baru rumah swadaya
 - PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)

- Pemeliharaan Lampu Jalan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan :
 - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
 - Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.
 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan :
 - Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.
 4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial
 - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.
 5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman :
 - Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman.
 - Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
 - Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
 - Koordinasi penataan areal pemakaman
 - Pemberian perijinan pemakaman
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.
 6. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Pembangunan drainase lingkungan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

BAB V

PENUTUP

Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan satu kesatuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bagian penting dari dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demi tercapainya hasil-hasil pembangunan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan kelancaran dan efektifitas pelaksanaannya dapat terarah dan terintegrasi diantara semua pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya untuk dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017.

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

**Ir. DENNIJ S.R PORAJOW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009**



**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017**

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (VOL)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJM)			3.581.476.000	
1.04	1.04.02	01	01	Penyediaan Kebutuhan Jasa Administrasi Umum	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	DPRKP	12 bln	3.226.014.000	
1.04	1.04.02	01	02	Penyediaan Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DPRKP	12 bln	50.394.000	
1.04	1.04.02	01	3	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Terlaksananya jasa administrasi barang dan jasa	DPRKP	12 bln	45.924.000	
1.04	1.04.02	01	07	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian	DPRKP	12 bln	0	
1.04	1.04.02	01	08	Penataan Kearsipan	Tertatanya Arsip Perkantoran	DPRKP	12 bln	0	
1.04	1.04.02	01	06	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	DPRKP	12 bln	259.144.000	
1.04	1.04.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			344.243.000	
1.04	1.04.02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	DPRKP	2 bh	55.000.000	
1.04	1.04.02	02	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	DPRKP	7 bh	6.000.000	
1.04	1.04.02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	DPRKP	0 bh	87.643.000	
1.04	1.04.02	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur gedung kantor yang diadakan	DPRKP	52 bh	85.000.000	
1.04	1.04.02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin	DPRKP	1 thn	10.000.000	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (VOL)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DPRKP	1 thn	85.600.000	
1.04	1.04.02	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	DPRKP	1 thn	10.000.000	
1.04	1.04.02	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	DPRKP	1 thn	5.000.000	
1.04	1.04.02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			18.750.000	
1.04	1.04.02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	DPRKP	25 Org	18.750.000	
1.04	1.04.02	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			0	
1.04	1.04.02	04	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Adanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPRKP	1 Keg	0	
1.04	1.04.02	04	04	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPRKP	1 Keg	0	
1.04	1.04.02	04	05	Inventarisasi, Integrasi Dan Pengelolaan Barang	Pelaporan hasil inventarisasi barang	DPRKP	1 Keg	0	
1.04	1.04.02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJMD)			4.000.000	
1.04	1.04.02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	DPRKP	1 Dok	1.000.000	
1.04	1.04.02	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	DPRKP	2 Dok	1.000.000	
1.04	1.04.02	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	DPRKP	1 Dok	1.000.000	
1.04	1.04.02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	DPRKP	1 Dok	1.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (VOL)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7		
	Urusan Perumahan							
1.04	1.04.02	15			7.750.000.000			
	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun						
1.04	1.04.02	15	01	Pembangunan Baru Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1 pkt	0	
1.04	1.04.02	15	19	Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan di Kecamatan Ratahan Wilayah I	Terbangunnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan	Ratahan	1 pkt	3.500.000.000
1.04	1.04.02	15	20	Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan di Kecamatan Ratahan Wilayah II	Terbangunnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan	Ratahan	1 pkt	3.500.000.000
1.04	1.04.02	15	21	Pengadaan Papan Nama Jalan	Terbangunnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan	Ratahan	1 pkt	200.000.000
1.04	1.04.02	15	05	Master Plan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)	Tersedianya Master Plan Pembangunan kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)	Minahasa Tenggara	1 Dok	0
1.04	1.04.02	15	06	Master Plan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)	Tersedianya Master Plan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)	Minahasa Tenggara	1 Dok	0
1.04	1.04.02	15	07	Sosialisasi Prosedur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Tersosialisasinya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Minahasa Tenggara	1 Keg	0
1.04	1.04.02	15	18	Pemeliharaan Lampu Jalan	Terpeliharanya Lampu Jalan	Minahasa Tenggara	1 Pkt	525.000.000
1.04	1.04.02	15	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev yang dilaporkan	Minahasa Tenggara, Manado, Jakarta	1 Thn	25.000.000
1.04	1.04.02	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Bantuan Lingkungan Sehat Perumahan			10.000.000
1.04	1.04.02	16	01	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		1 pkt	0
1.04	1.04.02	16	03	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		1 pkt	0

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (VOL)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.02	16	02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar		1 pkt	0	
1.04	1.04.02	16	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev yang dilaporkan	Minahasa Tenggara, Manado, Jakarta	1 Thn	10.000.000	
1.04	1.04.02	34		Program Perbaikan rumah akibat bencana alam / sosial	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana			0	
1.04	1.03.01	34	01	Perbaikan rumah akibat bencana alam / sosial	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana	Minahasa Tenggara	1 pkt	0	
1.04	1.04.02	35		Program Pengelolaan areal pemakaman	Tersedianya lahan untuk areal pemakaman			0	
1.04	1.03.01	35	01	Pengadaan lahan untuk areal pemakaman umum	Luasan areal pemakaman yang tersedia untuk umum		1 pkt	0	
J U M L A H								11.708.469.000	

Ratahan, September 2017
KEPALA DINAS,

Ir. DENNIJ S.R. PORAJOW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009